

# **Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur di Pileg 2019**

**Dyan Dwi Haquri<sup>1</sup>, Ali Sahab<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

**Abstract:** This study discusses women in Politics: Recruitment of Female Legislative Members of the East Java Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2019 Legislative Election. Through political parties, women can integrate themselves into the political system. One of the functions of political parties is as a means of political recruitment, in the study of political science this recruitment is an activity of choosing and selecting and then appointing qualified members to occupy political positions according to their abilities. This research is the result of qualitative research which aims to look at the recruitment process carried out by PDIP East Java. The researcher used the theory of the stages of recruitment from Pippa Norris and the data findings found that the recruitment process was carried out by the PDI Perjuangan party openly. Selection of legislative candidates starts from party cadres, in parties there is gender equality in determining legislative candidates. Political recruitment in selecting candidates was found, parties still prioritize potential candidates who have power for the benefit of the party in increasing votes. The selection process is carried out by the party structure. Decision making in selection shows a patronage relationship from the central leadership (DPP) and regional leaders (DPD) so that it can influence the process of recruiting legislative candidates.

**Keywords:** Political recruitment, female candidates, political parties, legislative elections.

## **PENDAHULUAN**

Pada pemilu 2019 yang mencakup dari pemilihan presiden dan pemilihan legislatif baik pada tingkat nasional, provinsi, dan atau kabupaten/kota diikuti oleh sebelas partai di Indonesia. Kesebelasnya antara lain PDIP, PKB, DEMOKRAT, GOLKAR, GERINDRA, PAN, NASDEM, PPP, PKS, HANURA DAN PBB. Dari kesebelas partai tersebut partai PDIP menjadi partai pemenang pada pemilu kali ini. Hal itu didukung dengan banyak kadernya yang menduduki kursi parlemen tingkat nasional/regional maupun kabupaten/kota. Dari fenomena pemilu kali ini menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengungkapkan adanya potensi terhadap peningkatan calon anggota legislatif (caleg) perempuan secara nasional (Perludem, 2019). Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Titi Direktur Perludem peningkatan jumlah caleg perempuan pada pemilu 2019 sebesar 40%, jumlah ini meningkat dari pemilu 2014 yang masih di bawah 38% (Nugraheny, 2019).

PDIP mendapat jumlah kursi terbanyak di lembaga legislatif tingkat daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dengan jumlah 27 kursi dan jumlah anggota laki-laki 19 orang dan anggota perempuan 8 orang. Sebagai partai besar di Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya memiliki kader laki-laki namun adanya kader perempuan menjadi hal penting bahwa

partai memberi kesempatan yang sama bagi perempuan menggunakan haknya dalam ranah publik. Jumlah anggota DPRD Jatim perempuan dari fraksi inipun pada periode 2019 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 30% keterwakilan perempuan dalam pengurusan serta struktur parpol, PDI Perjuangan juga salah satu partai yang mengimplentasikan kebijakan tersebut. Pemilihan Legislatif 2019 partai ini bisa menghantarkan caleg perempuannya cukup banyak dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat pada kursi DPRD Jawa Timur.

Proses rekrutmen pada tiap partai memiliki mekanisme masing-masing, dari beberapa literasi terkait yang mengulik tentang pola rekrutmen parpol pada saat pileg ataupun pilkada masih banyak parpol yang mengutamakan syarat-syarat tertentu dalam menerima bakal caleg maupun calon kepala daerah. Hasil studi dari jurnal terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu menyebutkan parpol memiliki peran penting sebagai perantara bagi calegnya dalam proses seleksi dan kandidasi internal partai, hal tersebut pula yang mampu mempengaruhi besar kecilnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif. Sebagaimana mestinya rekrutmen politik dilakukan guna memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan terjun dan berpartisipasi dalam partai politik. dan melihat pula karakteristik masyarakat modern kini yang mengutamakan kesetaraan gender dimana hak seperti berpartisipasi dalam ranah publik bukan lagi hak laki-laki saja, namun perempuanpun memiliki hak yang sama dalam ranah tersebut.

Perbedaan mekanisme rekrutmen yang diterapkan oleh parpol menjadi kajian yang telah banyak dilakukan saat ini. Proses rekrutmen yang adil dan mengutamakan kesetaraan gender dalam menseleksi calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan bisa berpengaruh terhadap parpol itu sendiri. Begitu pula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai besar di Indonesia yang telah banyak memiliki kader-kader yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia dan mampu menempatkan kadernya untuk menduduki kursi parlemen baik nasional atau provinsi dan atau kabupaten/kota, hasil tersebut pula menjadi bukti bahwa partai tersebut mampu memenangkan kontestasi pemilu pada tahun 2014 dan 2019. Beberapa kajian terkait rekrutmen politik yang diungkapkan oleh Syamsuddin haris dkk dalam jurnal Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru, mengungkapkan bahwa pada proses kandidasi dan nominasi parpol memiliki peran utama di dalamnya (Ekawati, 2018). Kendati hal tersebut memiliki dampak yang berbeda bagi para kandidat, maka hal yang dapat dilakukan untuk memanangi persaingan bisa dari menyiapkan persiapan yang matang. Pembekalan yang dilakukan oleh parpol pada setiap anggota kadernya merupakan aturan yang telah ada, namun persiapan secara mandiri yang matang bagi para calon legislatif berguna untuk memperkuat modal sosial politik serta finansial dalam bersaing antar sesama maupun dari lain partai.

Selain itu, sering kali tidak bisa dihindari dalam proses tersebut parpol akan menunjukkan sikap dimana mereka akan lebih mengedepankan kebutuhan dan keuntungan partainya. Contoh lain yang

bisa digambarkan proses rekrutmen kandidat calon yang dilakukan oleh DPC PPP Kota Tanjung Pinang dalam tulisan Dimas Andika (2004) menyebutkan bahwa proses rekrutmen dan kandidasi caleg yang dilakukan lebih mengutamakan faktor seperti kedekatan internal dimana para calon anggota legislatif ini akan lebih mudah masuk dan lancar pada seleksinya jika mengenal elite parpol terkait (Ekawati, 2017). Contoh lain yang menggambarkan hal serupa terdapat pada tulisan Helmi Mahadi (2008) yang menyebutkan proses rekrutmen yang dilakukan oleh internal PDIP terhadap proses pencalonan kepada daerah di indikasi berdasarkan pragmatisme politik (Ekawati, 2017).

Studi serupa lainnya dalam tulisan skripsi Mahendra Ramadani 2019, menguraikan proses rekrutmen anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan sistem open recruitment, dimana DPD PAN di kota tersebut menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan hak pribadinya dalam ranah publik untuk bisa mendaftarkan dirinya dan ikut berkontestasi dalam pemilu 2019.

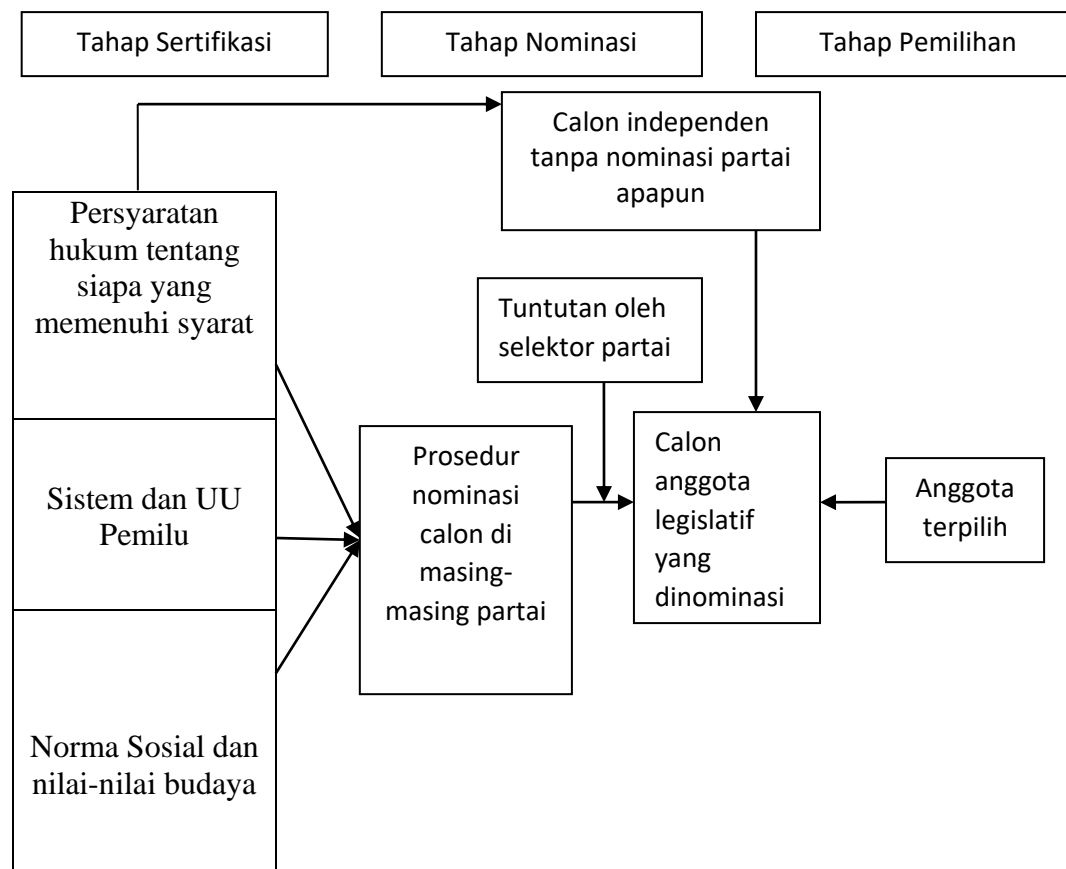
Dari studi kasus mengenai proses rekrutmen selain yang diuraikan diatas, ada pula studi serupa yang ditulis Lima Juliana dalam skripsinya yang membahas rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Tanjung Pinang. Dari hasil penelitian studinya disimpulkan bahwa rekrutmen yang dilakukan partai tersebut sifatnya rekrutmen tertutup, dimana PDIP cabang daerah ini lebih mengutamakan kadernya yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap partai untuk dapat mencalonkan diri dalam mengikuti pileg dan penentuan tersebut dilakukan dengan musyawarah internal partainya.

Dua contoh proses rekrutmen dari partai PDIP menunjukkan kebijakan rekrutmen anggota legislatif cenderung lebih tertutup, seperti contoh studi yang telah diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berikutnya. Terlepas dari semua gambaran proses rekrutmen diatas dapat dilihat bahwa partai-partai di Indonesia memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal menseleksi dan nominasi kandidat anggota legislatif.

## KERANGKA TEORI

Sebagai salah satu fungsi partai politik, rekrutmen dalam politik didefinisikan sebagai suatu seleksi dan pemilihan dari individu atau sekelompok, dalam hal ini dilakukan oleh partai politik untuk menjaring individu yang berkualitas serta berkompetan. Penyeleksian biasanya dilakukan untuk kader partai dan atau untuk calon legislatif pada pemilihan umum. Rekrutmen politik merupakan bagian vital dalam sistem politik, perekrutan yang jelas dan baik dalam menentukan arah tujuan dari parpol itu sendiri. Selain itu fungsi rekrutmen juga bisa untuk mempertahankan kekuasaan, sebagai contoh perekrutan anggota legislatif merupakan salah satu jalan bagi parpol untuk memperoleh kekuasaan. Pada penelitian ini akan memakai teori rekrutmen politik dari Pippa Norris yang dirasa cukup relevan untuk penelitian ini (Norris & Lovenduski, 1995). Dalam tulisan Pippa Norris (1995) yang berjudul

“Polical Recruitment” membagi tiga tahapan dalam proses menentukan calon kandidat legislatif yakni:



**Bagan 1 Proses Perekrutan Legislatif**

Sumber: Handbook Partai Politik *hal.* 150

Pertama, sertifikasi merupakan tahapan yang berkaitan dengan persyaratan formal memperhatikan beberapa faktor seperti hukum pemilu, peraturan partai dan norma sosial informal. Kriteria yang mengikuti tahapan ini dalam mencari kandidat potensial terbentuk oleh sejumlah faktor rincian tentang persyaratan hukum seperti syarat usia, Pipa Norris dalam bukunya mengungkap perihal minimum usia bisa sedikit lebih tinggi sesuai kebutuhan badan legislatif dalam mencari pemimpin publik.

Kedua, Nominasi, merupakan tahapan selanjutnya ketika calon kandidat memenuhi syarat. Nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai. Setidaknya ada dua pola dalam proses seleksi dan nominasi kandidat oleh parpol. Pertama seleksi yang menggunakan pola Patronage-Oriented System, yang aturan dan kewenangannya berdasar pada kepemimpinan tradisional daripada kewenangan legal-rasional, loyalitas pada kekuasaan di partai adalah utama. Meskipun berbagai sistem menekankan faktor-faktor yang berbeda dalam memilih calon, namun dibawah setiap sistem,

ada pertimbangan penting bagi parpol yakni menghadirkan para kandidat yang dapat menambah suara mereka. Kedua seleksi yang menggunakan pola *bureaucratic-oriented system* yakni sebuah pola dimana aturan seleksi detil, terstandarisasi, eksplisit dengan mengabaikan siapa yang ada dalam posisi kekuasaan, kewenangan berdasarkan prinsip legalistik.

Ketiga, Pemilihan, dalam konteks pemilihan ini berarti kandidat dipilih oleh pemilih. Tahap ini merupakan proses akhir yang akan menentukan siapa pemenang dalam legislatif. Di beberapa negara menganggap suara yang didapat perorangan itu penting. Selain ketiga tahap penentuan kandidat legislatif yang di bahas Pippa Norris dalam bukunya, pembahasan mengenai motivasi kandidat dalam politik menjadi pembahasan menarik. Pada faktor ambisi dapat pula dipahami, sebagai kecenderungan psikologis dimana kondisi ini, sosok kandidat memiliki keinginan untuk mencalonkan dirinya dalam pemilu guna ikut serta mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menjadi penggerak suatu perubahan dalam sistem politik (Norris, 1995:166-167). Pippa Norris menyebut, bahwasanya ambisi menjadi faktor penting dalam rekrutmen politik, hal ini di dasari oleh adanya ambisi akan memotivasi sosok kandidat legislatif dalam pencalonan. Hal yang sama di utarakan oleh Richard Matland, bahwa pola pada proses rekrutmen legislatif, berawal dari sebuah ambisi yang nantinya dapat membangkitkan sebuah motivasi seseorang untuk berkontestasi.

Kecenderungan psikologi sosial yang diutarakan Pippa Norris, dapat dipahami bahwa seseorang yang mencalonkan diri dalam kontestasi ini, berkeinginan merubah status sosialnya. Motivasi berupa Ambisi dalam diri seorang calon legislatif, untuk berada dalam suatu tingkat, baik dalam struktur masyarakat, maupun tingkatan partai. Relevansi teori Pippa Norris dengan rumusan masalah dalam penelitian ini melihat bagaimana proses rekrutmen dan tahapan apa saja yang dilakukan partai dalam menyeleksi anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan dalam pileg 2019 di DPRD Jawa Timur.

### **Proses Rekrutmen Kandidat Legislatif**

Pemilihan Legislatif 2019 diikuti oleh 14 partai politik, semuanya telah dinyatakan lolos dan memenuhi persyaratan salah satunya yakni PDIP. Partai tersebut mampu menghadirkan perempuan dalam kontestasi tersebut. Kehadiran perempuan dari partai ini pada lembaga legislatif tercatat 9 orang yang telah lolos di DPRD Jatim. Tidak hanya itu kemenangan PDIP dengan perolehan 27 kursi di DPRD Jatim pada pemilu 2019 menjadi tanda partai mampu mengubah peta pemilu 2014, karena jika menelisik kembali pada saat itu PDIP hanya memperoleh jumlah sebanyak 19 kursi di DPRD Jatim. Memenuhi ambang batas pada pemilu 2019 lalu, membuat partai siap berkomitmen dan mendukung tercapainya target dari 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan periode mendatang. Untuk itu konsisten dengan dibarengi upaya kongret perlu diterapkan dalam langkah partai selanjutnya. Penerapan kuota 30% ini bisa menjadi pecutan semangat baru bagi para perempuan. Adanya keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif dapat terwujud setelah melalui berbagai perjuangan

melawan stereotip patriarki dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan perempuan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dirasa akan mempengaruhi produk kebijakan yang dihasilkan.

Hampir partai-partai besar di Indonesia berupaya menghadirkan perempuan dalam ranah politik. Upaya tersebut dilakukan pula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjaring para perempuan dan membentuknya menjadi sosok berintegritas dan layak turun bermasyarakat. Kaderisasi partai yang baik bertujuan untuk membentuk individu berkualitas. Maka dari itu penjaringan kader pada momentum pileg sebagai calon kandidat perlu karena dapat menentukan posisi partai dalam peta pemilu. Proses Rekrutmen menjadi tahapan awal partai untuk menyeleksi perempuan berpotensi tinggi. Setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam menjalankan proses tersebut, dengan melihat pula pada beragam macam latar belakang, tingkat pendidikan dan kriteria lainnya. Untuk itu teori Pippa Norris mengenai proses rekrutmen kandidat legislatif perempuan dalam penelitian ini di bedakan pada seleksi partai dengan tiga spesifikasi antara lain tahapan sertifikasi, nominasi, dan pemilihan.

### **Seleksi Partai**

Pada momentum pemilu partai akan melakukan proses ini, seleksi partai merupakan proses yang dilakukan partai dalam melakukan seleksi para kandidat legislatif yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontes pemilihan legislatif. Dengan mekanisme dan peraturan yang berbeda pada setiap parpol, namun yang pasti partai memiliki peranan besar dalam menentukan siapa saja yang akan maju. Dari hasil wawancara dengan Hari Putri terlihat bahwa partai mengutamakan lebih dahulu pengurus struktural inti dalam pencalonan di legislatif. Pemberian privilege/keuntungan ini bagi kader yang menjadi pengurus inti untuk bisa mendaftarkan diri dari awal, oleh karenanya mereka bisa secara leluasa untuk memilih dapil. Menurut Hari Putri Lestari, tawaran tersebut diperoleh karena sebagai pengurus inti mereka telah bekerja dalam membantu kepartaian dalam program-program setiap harinya. Keuntungan tersebut menurutnya bisa menjadi bekal untuk mempersiapkan diri lebih awal pada persaingan di Pileg. Dari hasil wawancara tersebut peneliti beranggapan seleksi partai dalam mencari kandidat legislatif perempuan memilih banyak stok kader.

Kandidat legislatif yang berasal dari kader partai dalam perekrutan ini memang lebih diuntungkan karena telah lebih dulu menjadi anggota partai. Kemudian temuan lain diluar kader, partai juga terkadang mencari ketokohan pada profesi-profesi tertentu seperti pengusaha, artis, seniman, pensiunan jendral yang sekiranya dikiranya memiliki peluang menambah suara partai dalam pencalonan. Keterbukaan dalam penyeleksian PDI Perjuangan tidak hanya mengutamakan kader, namun partai juga memiliki pertimbangan selain kader partai dalam menentukan kandidat legislatif yang akan diseleksi. Ketentuan dari tim penyeleksi di PDI Perjuangan Jawa Timur yang dilakukan oleh struktural partai. Jadi elite partai yang memiliki jabatan pada kepengurusan inti berwenang

dalam menentukan kandidat pencalonan legislatif.

Seleksi kandidat legislatif laki-laki dan perempuan yang dilakukan struktural internal partai PDI Perjuangan sendiri terlihat cukup sistematis dengan menerapkan teori dari Pippa Norris yang membagi tahapan rekrutmen calon anggota legislatif menjadi tiga tahap antara lain tahap sertifikasi yakni persyaratan berdasarkan hukum atau peraturan partai dalam pencalonan legislatif, nominasi yakni terkait pola kekuasaan dalam tubuh partai saat menetapkan kandidat calon legislatif dan pemilihan yakni tahap akhir yang menentukan kandidat yang menang dan berhasil menduduki kursi dewan. Selanjutnya tahapan sertifikasi adalah proses dimana kandidat legislatif perempuan melewati dan lolos serta memenuhi semua persyaratan yang diterapkan oleh partai politik. Sesuai dengan yang di sampaikan oleh Pippa Norris uraian proses tahapan rekrutmen anggota legislatif perempuan akan dijelaskan sebagai berikut.

### **Sertifikasi**

Pada proses ini kandidat legislatif akan diseleksi dengan melihat persyaratan dalam penyeleksian yang ditetapkan partai memenuhi atau tidaknya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kebijakan partai politik bersangkutan. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tercantum dalam AD/ART, Tahapan ini merupakan tahapan yang awal bagi struktural partai sebagai yang menyeleksi untuk menentukan atau menjaring para kadernya baik laki-laki maupun perempuan yang berpotensi untuk menjadi calon anggota legislatif. Adapun penyeleksi pencalegan dari PDI Perjuangan Jatim yakni dari struktur inti dalam partai itu sendiri yang terdiri dari Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

Dalam proses sertifikasi berdasarkan temuan dilapangan PDI Perjuangan mengedepankan kader-kader yang militan seperti ketiga perempuan ini. Menjadi kader dan pengurus partai secara tidak langsung ketiganya yakni Hari Putri Lestari, Agatha Retnosari dan Sulistyorini lolos dalam memenuhi persyaratan partai. Struktural partai dalam menyeleksi pun melihat dari persyaratan umum seperti data diri, alamat, pendidikan, dan seperti kepopuleran, keaktifan dalam organisasi kandidat legislatif. Pemberian kesempatan bagi kader terlebih dulu pendapat narasumber yakni Agatha Retnosari, bagi masyarakat luar/ non kader yang berkeinginan nyaleg saat momennya saja akan kesulitan menghadapi rangkaian proses dalam partai. Kesulitan tersebut dikarenakan mereka bukan sebagai kader asli dan kurangnya kontribusi dalam kepartaian baik sebagai anggota kader ataupun pengurus.

Dari ketiga perempuan kandidat yang menjadi narasumber peneliti, mereka sebelumnya telah menjadi kader partai dan memiliki jabatan dalam struktur organisasi tersebut, hal ini yang membuat ketiga perempuan ini mendapat keuntungan dari hal tersebut saat pencalonan. Pada pencalonan pileg 2019 ketiganya maju bersaing dalam pemilihan legislatif setelah memenuhi sertifikasi dari partai. Ketiga kandidat perempuan itu dua diantaranya lolos dalam pemilihan yakni Agatha Retnosari dan Hari Putri



Lestari dan satu lainnya tidak berhasil lolos yakni Sulistyorini.

## Nominasi

Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sertifikasi. Dimana setelah kandidat legislatif memenuhi penilaian partai pada tahapan sebelumnya. Menurut Pippa Norris nominasi ini berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai, hal ini berarti apakah nominasi ditentukan oleh pimpinan partai nasional (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi). Sama dengan yang diungkapkan oleh Richard Matland bahwa penominasian kandidat merupakan tahapan penting untuk melihat peran pengurus partai dalam merekrut dan menempatkan kandidat legislatif dalam daftar calon dan setidaknya Matland membagi dua pola yakni pola Patronage-Oriented System dan pola Bureaucratic-Oriented System untuk mengetahui peranan partai saat penyeleksian. Adapun temuan data dilapangan, kewenangan pada tubuh PDI Perjuangan Jatim dalam proses penominasian kembali pada struktural di DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yakni mencakup ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua.

Dari wawancara dengan Agatha Retnosari Caleg perempuan terpilih, terlihat bahwa keputusan partai menentukan kandidat legislatif didelegasikan pada pimpinan daerah. Kemudian dalam nominasi ini partai terlihat menggunakan pola seleksi bureaucratic-oriented system, ini bisa dilihat dengan aturan seleksi yang cukup detail, misal pemberlakuan sistem skoring/pembobotan, kedua yaitu terstandarisasi bagi kader memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota,) juga pertimbangan kelayakan dan keaktifan pada partai. Namun dalam indikator Richard Matland yang tentang tidak mengabaikan siapa yang ada dalam posisi kekuasaan justru memastikan PDI Perjuangan partai dengan pola Patronage-Oriented System. Fakta demikian bisa dilihat dengan pola PDIP yang masih tidak lepas dari kewenangan berdasar pada kepemimpinan tradisional daripada kewenangan legal-rasional. Keputusan nominasi penentuan kandidat pada setiap tingkatan cabang partai, tidak lepas dari peran campur tangan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Sekalinya pada tingkatan daerah struktural partai, ketua DPD memiliki peranan dalam menentukan kandidat, akan tetapi semua itu tidak lepas dari peran ketua umum pusat dalam mempengaruhi penentuan calon. Temuan data dilapangan penominasian dari ketiga kandidat perempuan PDIP Jatim ini, mereka memenuhi kriteria dari mulai pengabdian, kelayakan dan keaktifan pada partai, jaringan yang dimiliki, juga kompetensinya.

Nominasi yang terlihat dari pola kekuasaan dalam tubuh partai PDI Perjuangan Jatim, wewenang pengambilan keputusan atas kandidat calon legislatif bisa dikatakan didelegasikan pada ketua DPD, namun dalam hal ini DPP (Dewan Perwakilan Pusat) juga memiliki hak untuk intervensi dalam penentuan kandidat legislatif yang akan dikirimkan ke KPU. Dari ketiga perempuan kandidat dalam penelitian ini, ketiga memiliki kesempatan yang sama, karena kesetaraan ada dipartai. Pencalonan



ketiganya untuk menjadi anggota legislatif dinilai tidak ada hambatan dikarenakan peran ketiga perempuan ini pada struktural partai menjadi keuntungan selama proses seleksi.

## Seleksi Diri

Pada proses ini akan melihat sisi terkait faktor kandidat perempuan terjun dalam kontestasi Pileg. Sebagian perempuan kita masih dalam stereotip gender, keterlibatan mereka dalam politik masih minim saat ini. Adapun kebijakan pemerintah yang mengatur hak politik perempuan masih perlu dioptimalkan kembali. Kontestasi Pileg 2019 telah terlihat banyak kehadiran perempuan mengikutinya. Partai sebagai kendaraan politik yang menaungi para perempuan ini telah menunjukkan hasil dari keberhasilannya pada agenda politik tersebut. Proses yang dilalui kandidat perempuan tidak hanya seleksi dari partai saja. Pengenalan diri perlu dilakukan jika ingin berpartisipasi pada kontestasi ini. Kandidat perempuan yang masuk dalam proses rekrutmen, sebelumnya pasti telah mengukur potensi akan kemampuan dirinya. Seleksi diri ini akan fokus membahas dan melihat dari sisi psikologis dalam diri kandidat legislatif perempuan juga terkait motivasinya melebur pada kontetasi Pileg.

Keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tidak datang hanya dari keinginan saja, tentunya sosok kandidat memiliki motivasi dalam diri masing-masing. Motivasi bisa hadir dari banyak faktor. Ini bisa dilihat tidak sedikit perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu Legislatif DPRD Jawa Timur 2019 lalu, misalnya kandidat perempuan dari PDI Perjuangan Jatim dalam penelitian ini, mereka tentu saja memanfaatkan peluang yang ada dan pada gilirannya menguatkan motivasi mereka. Motivasi yang dibawah oleh ketiga kandidat perempuan ini dapat disimpulkan bahwa mereka terjun dalam politik melalui pemilihan legislatif, dikarenakan adanya aspek fundamental seperti jejaring politik di partai itu sendiri dimana memang ketiganya bergabung dipartai tidak hanya menjadi kader namun juga memiliki jabatan pada struktur organisasi. Juga jejaring sosial berkaitan antara kandidat dengan kelembagaan luar di masyarakat, keaktifan ketiganya turun dimasyarakat sehingga dikenal selama bergabung dipartai. Selain itu ambisi personal merupakan acuan dalam diri ketiga kandidat perempuan ini agar dapat meleburkan diri pada sistem politik.

## Ambisi Personal

Seperti yang disampaikan oleh Pippa Norris, sosok kandidat yang memiliki keinginan mengikatkan diri pada sistem politik dalam hal ini pemilihan legislatif diawali dari faktor ambisi. Keinginan menjadi penggerak dalam suatu sistem di pemeritahan demi menghasilkan perubahan bisa menjadi faktor ambisi dan dibawah oleh kandidiat legislatif. Dari temuan data dilapangan, ketiga kandidat perempuan yang ditemui memperlihatkan ambisi tersebut. Ditambah dengan ketiganya menyadari

potensi dan kemampuan dirinya untuk mewujudkan hal tersebut. Suatu kebijakan yang bisa membuat perubahan memang dibutuhkan oleh rakyat. Posisi dewan sebagai penyambung tangan bagi rakyat dalam membantu dan memberi solusi atas permasalahan kepentingan umum, telah seharusnya terisi oleh orang-orang yang memiliki passion pada posisi tersebut. Hal ini yang dilakukan oleh Agatha agar keberadaan dan kemampuannya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Motivasi dari dua kandidat perempuan lainnya juga serupa.

Keberanian yang datang kepada ketiga kandidat perempuan untuk meleburkan diri dipolitik membawa pula beragam alasan menyertainya. Dibarengi oleh banyak faktor yang mempengaruhi motivasi dalam diri kandidat. Salah satunya melalui sebuah ambisi. Setiap individu memiliki ambisi, hal tersebut bisa menjadi motivasi dalam mewujudkan tujuannya. Sama halnya dengan ambisi personal dari ketiga kandidat caleg perempuan ini. Ketiganya berkeinginan untuk mengembangkan diri dan bisa mengabdikan juga bermanfaat kepada masyarakat. Pandangan Agatha tentang partai politik sebagai alat perjuangan ideologi, merupakan pematik terbentuknya ambisi personal dalam dirinya. Memiliki tujuan yang sama dengan yang disampaikan Hari Putri Lestari, keterlibatan Agatha pada dunia politik tak lain dari keinginan membuat perubahan dalam hal ini produk politik yakni kebijakan/peraturan. Dengan ambisi personal masing-masing kedua kandidat perempuan diatas mampu melebarkan langkahnya dalam kursi dewan. Adanya keterwakilan mereka dilegislatif setidaknya akan bermanfaat dalam perumusan kebijakan.

### **Dukungan Eksternal**

Dukungan eksternal yang dimaksud disini adalah, dorongan dari siapa saja yang akhirnya menjadi motivasi kandidat perempuan ini maju dalam pencalonan saat itu. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dorongan dalam diri saja mungkin tidak cukup mampu memotivasi diri kandidat untuk memantapkan langkah ke kursi dewan DPRD Jawa timur. Oleh sebab itu dukungan orang-orang di lingkungan bisa menentukan. Adapun orang-orang yang dimaksud antara lain keluarga, kerabat, atau teman-teman. Dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa ketiga kandidat perempuan PDIP Jatim ini selain mampu mengukur kemampuan dirinya juga didukung dengan orang-orang di sekitar mereka yang akhirnya memantapkan langkah mereka.

### **Pemilihan**

Pemilihan merupakan tahapan akhir dari proses rekrutmen politik. Kandidat perempuan yang berkompetisi dapat dipilih langsung oleh pemilih. Pemilih disini dapat menentukan dan melihat langsung sosok kandidat legislatif yang sesuai dengan keinginannya. Dari pemilihan ini kandidat yang terpilih setidaknya mampu bertugas dan menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat di kuris dewan daerah serta bertanggung jawab pada jabatannya. Pemilih pada pemilu legislatif 2019 terlihat banyak dari perempuan. Hal ini berarti masih dibutuhkannya sosok pemimpin perempuan yang dapat

merepresentasi kepentingan terkhusus perempuan. Partai politik sebagai wadah menyambung aspirasi masyarakat hendaknya mampu menghadirkan perempuan potensial dalam agenda politik tahunan yakni Pileg. Ketiga kandidat perempuan PDI Perjuangan Jatim dalam penelitian ini merupakan kandidat yang bisa dikatakan potensial setelah diseleksi oleh partai. Ketiga perempuan kandidat ini juga mampu melihat potensi dalam dirinya dan memantapkan langkah pada persaingan ini. Tahapan ini inti dan penentu keberhasilan mereka dalam meraih kursi dewan. Pada saat pemilihan memilih sebagai penentu, karena dari sana mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas. Dan pada akhirnya hasil dari suara mereka dapat terlihat saat pemungutan suara.

## KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil fokus pada rekrutmen dan motivasi anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jatim dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa point penting, seperti PDI Perjuangan merupakan partai politik terbuka, dimana partai memberi kesempatan bagi siapapun yang berkeinginan untuk masuk. Kemudian untuk terkait rekrutmen kandidat legislatif partai mengutamakan kader terlebih dahulu. Demikian hal ini dikarenakan partai telah melakukan kaderisasi, sehingga dalam menyeleksi kandidat legislatif partai bisa mengetahui kandidat potensial yang dicalonkan.

Selain itu dalam partai sendiri sudah ada kesetaraan gender, dimana antara kader laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan sama dalam pencalonan. Ditambah adanya kebijakan partai yang tercantum pada AD/ART dari pemberlakuan kuota perempuan pada struktur partai dan lembaga legislatif. Rekrutmen politik tidak hanya persoalan pencalonan wakil-wakil terpilih tingkat lokal, daerah dan nasional, namun rekrutmen politik juga tidak lepas dari persoalan pengisian jabatan politik dari penunjukkan patronase. Hal ini dapat dilihat pada saat PDI Perjuangan melakukan proses seleksi untuk kandidat legislatif di DPRD Jawa Timur. Sebagai partai terbuka rekrutmen kandidat legislatif, partai tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Demikian partai dapat mengambil dari kader-kadernya. Disisi lain partai juga ingin merekrut sosok tokoh dengan tujuan untuk kepentingan menambah suara partai.

Dari temuan data terlihat bahwa distribusi kekuasaan berada pada struktural partai, hal ini dapat mempengaruhi proses seleksi pancalegan legislatif. Penentuan kandidat legislatif dari PDIP Jatim ini, kekuasaan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua, di mana struktural DPD Dewan Pimpinan Daerah dapat mengusulkan para kandidat potensial. Namun keputusan akhir berada pada di pusat. Tidak dapat dipungkiri selama proses ini partai politik belum lepas dari hubungan patronase, dimana kedekatan dengan elite partai dapat mempengaruhi proses seleksi.

## DAFTAR PUSTAKA



- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan perempuan pada pemilu pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67–80.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament*. Cambridge University Press.
- Nugraheny, D. E. (2019). Caleg Perempuan Kian Kuat di Pemilu 2019. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/09/11/pxmbqa282-caleg-perempuan-kian-kuat-di-pemilu-2019>
- Perludem. (2019). *Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019*. Perludem.Org. <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>